



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A
SK BAN-PT No: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kebijakan Nasionalisme Ekonomi India terhadap Produk
***Genetically Modified Organism (GMO)* Monsanto pada tahun**
2012-2018

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Henry Mulyana

2015330019

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A
SK BAN-PT No: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kebijakan Nasionalisme Ekonomi India terhadap Produk
***Genetically Modified Organism (GMO) Monsanto* pada**
tahun 2012-2018

Skripsi

Oleh

Henry Mulyana

2015330019

Pembimbing

Giandi Kartasmita

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Henry Mulyana
Nomor Pokok : 2015330019
Judul : Kebijakan Nasionalisme Ekonomi India terhadap Produk *Genetically Modified Organism* (GMO) Monsanto pada tahun 2012-2018

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 16 April 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Adelbertus Irawan J. Hartono : _____

Sekretaris

Giandi Kartasmita, S. Ip., M.A. : _____

Anggota

Dr.phil. Aknolt Kristian Pakpahan : _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henry Mulyana

NPM : 2015330019

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Kebijakan Nasionalisme Ekonomi India terhadap Produk *Genetically Modified Organism* (GMO) Monsanto pada tahun 2012-2018

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku, apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 April 2019

Henry Mulyana

ABSTRAK

Nama : Henry Mulyana
NPM : 2015330019
Judul : Kebijakan Nasionalisme Ekonomi India terhadap Produk *Genetically Modified Organism* (GMO) Monsanto pada tahun 2012-2018

Pada tahun 1995 Monsanto mengimpor 100 gram bibit kapas yang mengandung MON531-Bt Gene ke India tanpa ada persetujuan dari *The Genetic Engineering Appraisal Committee* (GEAC). Walaupun tidak ada persetujuan dari Komite Penilai Rekayasa Genetik, Monsanto melalui *Review Committee of Genetic Manipulation* (RCGM) yang berada dibawah Departemen Bioteknologi, meminta izin untuk mengimpor bibit tersebut. Hal yang menjadi permasalahan adalah Departemen Bioteknologi ataupun RCGM tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin terhadap impor bibit tersebut. Tanpa adanya izin dari GEAC, Monsanto secara nyata telah menyelundupkan zat rekayasa genetik ke India. Sejak masuknya Monsanto ke India pada tahun 1997, harga bibit kapas telah naik sebesar 80.000%, yang sebelumnya hanya berkisar 5-9 Rupee per kilogram menjadi 3200 Rupee per kilogram. Disebabkan oleh harga bibit yang mahal, sebanyak 200.000 petani india terjebak dalam hutang dan kegagalan panen, membuat mereka tidak memiliki pemasukan yang cukup dan akhirnya melakukan bunuh diri. Setidaknya ditemukan fakta bahwa sebesar 84% dari aksi bunuh diri tersebut disebabkan oleh Monsanto. Melihat India sebagai negara penghasil tekstil terbesar, hal ini merupakan ancaman bagi India dan bagi delapan juta penduduk India yang berprofesi sebagai petani kapas. Hal tersebut merupakan ancaman, baik secara ekonomi maupun secara sosial bagi India. Oleh karena itu India telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangani hal tersebut.

Dalam menganalisa permasalahan yang ada, penulis akan menggunakan konsep kepentingan nasional dan sekuritisasi isu untuk menganalisis langkah yang diambil pemerintah India dalam menjadikan isu yang ada menjadi isu keamanan. Setelah itu, penulis akan menggunakan hukum internasional yang mengatur bibit rekayasa genetik dan penyebarannya dalam menganalisa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah India sudah sesuai dengan hukum internasional yang ada atau belum. Selanjutnya, penulis akan menggunakan teori nasionalisme ekonomi melalui indikator yang ada untuk melihat apakah pemerintah India telah melakukan nasionalisme ekonomi beserta tingkat nasionalisme ekonomi yang dilakukan.

Kata Kunci: Monsanto, *GMO*, India, *WTO*, Nasionalisme ekonomi

ABSTRACT

Name : Henry Mulyana
Student Number : 2015330019
Title : India's Nationalism Economy Policies towards Monsanto's Genetically Modified Organism in 2012-2018

In 1995 Monsanto imported 100 grams of cotton seeds containing MON531-Bt Gene to India without approval from The Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC). Although there was no permission from the Genetic Engineering Assessment Committee, Monsanto, through the Review Committee of Genetic Manipulation (RCGM) under the Department of Biotechnology, requested permission to import the seeds. The problem was the Department of Biotechnology or RCGM does not have the authority to grant permits to import these seeds. Without permission from GEAC, Monsanto has actually smuggled genetic engineered seeds into India. Since Monsanto's entry into India in 1997, the price of cotton seedlings has risen by 80,000%, previously priced around 5-9 Rupees per kilogram to 3200 Rupees per kilogram. Due to the high price of seeds, as many as 200,000 Indian farmers are caught in debt trap and crop failures and eventually committing suicide. At least found the fact that 84% of suicides were caused by Monsanto. Seeing India as the largest textile producer, this is a threat to India and to eight million Indians who work as cotton farmers. This is threatening for both India's economy and social dimension, therefore, India has issued several policies to deal with this issue.

In analysing existing problems, the author will use the concept of national interest and issue securitisation to analyse the steps taken by the Indian government in making the existing issue a security issue. After that, the author will use international law that regulates the genetically modified organism and its distribution in analysing actions taken by the Indian government in accordance with existing or not international law. Furthermore, the author will use economic nationalism theory through existing indicators to see whether the Indian government has carried out economic nationalism along with the level of economic nationalism carried out.

Keywords: Monsanto, GMO, India, WTO, Economic Nationalism

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Semesta karena atas penyertaannya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Sejak Monsanto mengimpor bibit kapas yang mengandung MON531-Bt Gene ke India tanpa ada persetujuan dari *The Genetic Engineering Appraisal Committee* (GEAC). Monsanto secara nyata telah menyelundupkan zat rekayasa genetik ke India. Sejak masuknya Monsanto ke India pada tahun 1997, harga bibit kapas telah naik sebesar 80.000%, yang sebelumnya hanya berkisar 5-9 Rupee per kilogram menjadi 3200 Rupee per kilogram. Disebabkan oleh harga bibit yang mahal, sebanyak 200.000 petani india terjebak dalam hutang dan kegagalan panen, membuat mereka tidak memiliki pemasukan yang cukup dan akhirnya melakukan bunuh diri. Setidaknya ditemukan fakta bahwa sebesar 84% dari aksi bunuh diri tersebut disebabkan oleh Monsanto. Melihat India sebagai negara penghasil tekstil terbesar, hal ini merupakan ancaman bagi India maupun bagi delapan juta penduduk India yang berprofesi sebagai petani kapas. Hal tersebut merupakan ancaman, baik secara ekonomi maupun secara sosial bagi India. Oleh karena itu India telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangani hal tersebut.

Penelitian ini menganalisis keputusan India melakukan nasionalisme ekonomi terhadap produk Monsanto sebagai respons atas bunuh diri massal yang terjadi. Alasannya, nasionalisme ekonomi yang dilakukan oleh India mungkin melanggar seperangkat peraturan dagang. Penelitian ini diarahkan untuk menemukan alasan dibalik nasionalisme ekonomi yang India lakukan terhadap Monsanto.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan baik secara teknis maupun substansi. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk melengkapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Namun, penulis berharap bahwa skripsi ini mampu bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang bersangkutan. Besar harapan penulis agar skripsi ini diberikan saran, kritik, dan rekomendasi yang membantu untuk penyempurnaan skripsi ini.

Bandung, 10 April 2019

Henry Mulyana

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini merupakan bentuk manifestasi penulis bagi mereka yang telah berkontribusi membantu penulis selama berdinamika di HI Unpar. Penulis sadar bahwa segala kata dan frasa yang tertuang tidak mampu mewakili rasa yang sebenarnya kepada setiap dari mereka yang telah membantu penulis. Untuk itu, penulis akan selalu menyertakan rasa syukur dan doa kepada setiap dari mereka, yaitu:

Semesta – sebagai entitas yang selalu membuat penulis bersyukur dan rendah hati. Meski dalam perjalanan kuliah penulis berulang-kali mempertanyakan segala hal yang bersifat abstrak, pada akhirnya selalu menyadari bahwa penulis hanya merupakan makhluk yang tidak berarti di hadapan-nya. Syukur selalu terucap karena diberikan waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan perjalanan S1 ini.

Pendukung Utama.

Mama dan Papa

Cici dan Om

Sosok Luar biasa di balik HI Unpar.

Mas Giandi Kartasasmita – Dosen Wali yang kemudian menjadi mentor penulis ketika menjadi ketua acara *English Public Speaking Workshop*. Beliau pula yang akhirnya menjadi pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa syukur selalu penulis panjatkan karena diberi kesempatan untuk mengenal beliau. Semoga sehat selalu, mas. Sukses terus ke depannya!

Dan dosen-dosen hebat yang membimbing penulis selama 3,5 tahun.

Mba Syl, Mas Abe, Mas Idil, Mas Mangadar, Mba Suke, Mba Ratih, Mba Jess, Mas Apres, Bang Tian, Mba Nophie, Bang Atom, Mas Pur, Mas Ir, Mas Saptia, Mba Anggia, Mba Prisca

Mereka yang telah tenang bersama-Nya. Terima kasih selalu atas bimbingannya.
Alm. Mas Nur, Alm. Mba Diandra, dan Alm. Mas Bob

dan segenap manusia-manusia yang bertemu selama Penulis berkuliah,

Sultan Madiba – Yang membantu penulis dalam menentukan topik penulisan

Zalika Dwi Affryna & Fajrina Nadira – Teman yang menyertai kehidupan kuliah penulis dari awal hingga akhir, yang selalu menjadi telinga untuk mendengarkan cerita penulis

Nindyo Setiawan & Joshua Adrian – Pertemanan tidak sehat yang merusak pola tidur melalui warnet, perjalanan ke Jakarta merupakan momen terbodoh yang penulis pernah lakukan bersama mereka.

Valentinus Marchelle & Bimo Wisaksono – Selaku teman main penulis yang selalu berhasil mengisi waktu luang penulis

Ezra PT & Joe William– Sebagai teman penulis yang berada satu angkatan dibawah, yang membantu perkembangan penulis secara akademik

Satria Yuma– Teman penulis yang juga mewarnai kehidupan penulis selama menjalani kuliah.

Nando– Teman penulis di akhir kehidupan kuliah, yang menjadi salah satu sumber kebocoran uang penulis, dan sosok yang memberi perspektif baru dalam melihat hal-hal yang ada.

Ficky– Sosok yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam segala aspek kehidupan penulis, sosok pendengar yang sangat baik dan sebuah sosok sahabat.

Penulis bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan oleh Semesta sehingga penulis dapat bertemu individu-individu di kehidupan kuliah ini.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terimakasih	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Akronim	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.2.1 Deskripsi masalah	4
1.2.2 Pembatasan Masalah	6
1.2.3 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7
1.4 Tinjauan Pustaka	7
1.5 Kerangka Pemikiran	9
1.6 Metode dan Jenis Penelitian	34
1.6.1 Metode Penelitian	34
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	35
1.7 Sistematika Pembahasan	35
BAB II MONSANTO DAN PERMASALAHAN <i>GENETICALLY MODIFIED ORGANISM</i> (GMO)	37
2.1 Monsanto	37
2.1.1 Profile Monsanto	37
2.1.2 Permasalahan GMO Monsanto	40
2.2 Bahaya Bibit GMO	50
2.3 Hukum Internasional	52
2.3.1 <i>Cartagena Protocol</i>	53
2.3.1.1. Tujuan dan Definisi	54
2.3.1.2. Prinsip-prinsip Dasar untuk Transportasi Transgenik	55
2.3.1.3. Transmisi Lintas Batas Ilegal	57
2.3.2 <i>Nagoya - Kuala Lumpur Supplementary Protocol</i>	57
2.3.2.1 Tujuan dan Definisi	59

3.3.2.2. Prinsip Dasar	60
3.3.2.2. Aplikasi Tambahan Hukum Domestik	61
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB NASIONALISME-EKONOMI	62
3.1 Internal	62
3.1.1 Mass Suicide	62
3.1.2 Sekuritisasi Isu oleh NCRB	63
3.1.3 Putusan Mahkamah Agung	66
3.1.4 Konstitusi India	67
3.1.5 Perlindungan terhadap Komoditas Kapas	70
3.2 Faktor Eksternal	70
3.2.1 <i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> (TRIPS)	71
3.2.2 <i>General Agreements on Tariffs and Trade</i> (GATT)	74
3.2.3 <i>Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measure</i> (SPS)	75
3.3 Nasionalisme Ekonomi	79
3.3.1. Indikator Nasionalisme Ekonomi	79
3.3.1.1 Mendukung Domestik dan Membatasi Asing	80
3.3.1.2. Swasembada sebagai Produk Sampingan	81
3.3.1.3. Peran dari Kekuatan	82
3.3.1.4 Intervensi dan Proteksionisme	83
3.3.2 Tingkat Nasionalisme-Ekonomi	84
BAB IV KESIMPULAN	87
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Monsanto Masuk ke India	37
Gambar 3.1	Jumlah Bunuh Diri Petani 1995-2015	62
Gambar 3.2	Produksi Kapas di Mahasastra	67
Gambar 3.3	Produksi Kapas di Gujarat	67
Gambar 3.5	Produksi Kapas di India	68

DAFTAR AKRONIM

BJP	<i>Bharatiya Janata Party</i>
GATT	<i>General Agreements on Tariffs and Trade</i>
GEAC	<i>Genetic Engineering Appraisal Committee</i>
GMO	<i>Genetically Modified Organism</i>
IBF 1	<i>Growth Factor One</i>
NCRB	<i>National Crime Records Bureau</i>
PPVFRA	<i>Protection of Plant Variety and Farmers Rights Act</i>
RCGM	<i>Review Committee of Genetic Manipulation</i>
RSCT	<i>Regional Security Complex Theory</i>
SPS	<i>Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measure</i>
TBT	<i>Agreement on Technical Barriers to Trade</i>
TRIPS	<i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right</i>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebuah kondisi tanpa campur tangan pemerintah, dimana harga dari sebuah barang dan jasa ditentukan oleh pasar adalah sebuah sistem ideal yang diinginkan dari sebuah ekonomi. Sebuah pasar bebas berbeda dengan situasi pasar yang diatur dimana pemerintah mengatur mekanisme permintaan dan penawaran melalui berbagai cara seperti memberlakukan tarif, memberi hambatan dagang demi melindungi ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam pasar bebas, pergerakan barang dan jasa dan mekanisme penentuan harga sampai ke titik equilibrium seluruhnya diserahkan ke pasar tanpa adanya intervensi dari pemerintah dan kebijakannya.¹

Melihat melalui konteks yang lebih luas, prinsip-prinsip pasar bebas juga sudah diterapkan di dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki arti pertukaran barang dan jasa yang melintasi batas-batas negara. Hal ini dilakukan karena suatu negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda terutama dalam hal sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Selain itu juga di dalam perdagangan internasional terdapat beberapa aktor seperti negara, perusahaan multinasional, individu, perusahaan lokal, organisasi, namun

¹ Ian Adams, *Political Ideology Today*, (Manchester University Press: 2001). Hal. 20

aktor terbesar dari perdagangan internasional adalah negara dan perusahaan multinasional.²

Globalisasi telah membawa perubahan dalam perkembangan teknologi dan perekonomian saat ini. Globalisasi yang ditandai dengan semakin kaburnya batas-batas teritorial negara memungkinkan adanya perpindahan barang dan jasa dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang cepat. Globalisasi telah menyebabkan berbagai perubahan dalam relasi dan hubungan antar negara-negara di dunia terutama dalam perdagangan. Perdagangan telah menyatukan aktor yang satu dengan yang lain dalam suatu ikatan yang bertujuan untuk menciptakan keuntungan bersama dan saling melengkapi akan sumber daya yang tidak dimiliki oleh suatu negara.

Dengan didukung oleh penguasaan teknologi yang memadai, sebuah perusahaan multinasional dapat dengan mudah mendominasi suatu sektor. Monsanto merupakan perusahaan transnasional Amerika Serikat yang bergerak di bidang agrikultur dengan produk bibit yang telah direkayasa secara genetik atau yang sering disebut dengan *genetically modified organism* (GMO). Dimulai dari tahun 1977, Monsanto yang sebelumnya bergerak di bidang kimia merubah fokusnya ke bidang makanan dan agrikultur.³ Dengan kapabilitas teknologi yang

² Ronald W. Jones, "Comparative Advantage and the Theory of Tariffs: A Multi-Country, Multi-Commodity Model", *The Review of Economic Studies*. Vol. 28, Issue 3, 1961. Hal. 161–175

³ Dr Mercola, "The Chilling History of Monsanto's Rise to Power", Mercola: Juli, 2016. <https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2016/07/23/monsanto-glyphosate-contamination.aspx> (diakses 20 Februari 2018)

dimiliki, Monsanto dapat melakukan produksi bibit yang telah direkayasa secara genetik.

Manusia pada dasarnya harus dapat menyediakan dan menghasilkan makanan yang mencukupi untuk konsumsi seluruh manusia, namun dalam mencapai hal tersebut, harus tetap mempertimbangkan sumber daya yang ada tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Bergerak dari hal tersebut, harus ada upaya peningkatan berkelanjutan dari segi agrikultur untuk meminimalisir penggunaan lahan dan meningkatkan hasil panen. Pemilihan bibit unggul merupakan hal yang krusial karena hal tersebut dapat membuat hasil panen lebih banyak, lebih tahan terhadap hama dan penyakit, dan juga memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik.⁴

Masuknya Monsanto ke India didukung oleh pemerintah Amerika Serikat dalam menghadapi regulasi yang ada. India memiliki hukum yang sangat kuat dalam melarang paten atas kehidupan, tetapi pemerintah Amerika Serikat menghalangi pemeriksaan wajib terhadap Monsanto mengenai kemungkinan pelanggaran hukum hak atas kekayaan intelektual di India. Monsanto juga diduga memasukan bibit kapas rekayasa ke India secara tidak resmi pada tahun 1995, yang merupakan awal dari masuknya Monsanto ke India.⁵

⁴ Kent Bradford, "Why is GMO Important?", GMO Answers: April, 2014. <https://gmoanswers.com/ask/why-gmo-important-human-society> (diakses 20 Februari 2018)

⁵ Dr Vandana Shiva, "HOW MONSANTO WROTE AND BROKE LAWS TO ENTER INDIA", Seedfreedom: Juli, 2016. <http://seedfreedom.info/how-monsanto-wrote-and-broke-laws-to-enter-india/> (diakses 20 Februari 2018)

Pada era liberal ini dimana seharusnya ada kebebasan dalam alur pertukaran barang dan jasa, masih terdapat hambatan-hambatan perdagangan yang muncul. Melihat adanya hambatan internal dari India terhadap upaya Monsanto dalam penjualan produk bibit rekayasa genetik ke India, penulis tertarik untuk mengangkat topik **Nasionalisme-ekonomi di Era Liberalisme, Studi Kasus: GMO Monsanto di India**

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi masalah

Meskipun tujuan dari perdagangan internasional adalah untuk membantu pemenuhan barang dan jasa di suatu negara, terkadang dalam praktiknya, perusahaan sebagai aktor bisnis masih tetap berfokus kepada laba yang sebanyak-banyaknya. Seperti yang dilakukan oleh Monsanto di India, sejak dari masuknya Monsanto ke India pada tahun 1997, harga bibit kapas telah naik sebesar 80.000%, yang sebelumnya hanya berkisar 5-9 Rupee per kilogram menjadi 3200 Rupee per kilogram.⁶

Disebabkan oleh harga bibit yang mahal, sebanyak 200.000 petani india terjebak dalam hutang akibat kegagalan panen, membuat mereka tidak memiliki pemasukan yang cukup dan akhirnya tercatat selama dua dekade, sebanyak

⁶ Dr Vandana Shiva, "Monsanto vs Indian Farmers", Seedfreedom: Maret, 2016. <http://seedfreedom.info/monsanto-vs-indian-farmers/> (diakses 20 Februari 2018)

200.000 petani kapas melakukan bunuh diri di India. Setidaknya ditemukan fakta bahwa sebesar 84% dari aksi bunuh diri tersebut disebabkan oleh Monsanto.⁷

Pada tahun 2016, sebanyak 8 juta petani kapas menunggu musim menanam, tapi tidak semua dari mereka mendapatkan bibit kapas. Melihat India sebagai negara penghasil tekstil terbesar, hal ini merupakan ancaman bagi ekonomi dan sosial bagi India maupun bagi delapan juta penduduk India yang berprofesi sebagai petani kapas. Merespon hal tersebut India mengeluarkan beberapa kebijakan terkait.⁸

Di sisi lain, perdagangan internasional seharusnya tidak dibatasi. Apa yang dilakukan India terhadap Monsanto merupakan pelanggaran terhadap prinsip perdagangan bebas. Dalam upaya membatasi pengaruh Monsanto di India, pemerintah India telah menetapkan seperangkat kebijakan yang salah satunya adalah mengontrol jumlah barang yang masuk, menaikkan harga jual bibit kapas rekayasa, dan melarang total peredaran bibit kapas rekayasa. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa India melakukan praktik ekonomi-nasionalisme terhadap *genetically modified organism* kapas Monsanto.⁹

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Dr Vandana Shiva, "HOW MONSANTO WROTE AND BROKE LAWS TO ENTER INDIA", Seedfreedom: Juli, 2016. <http://seedfreedom.info/how-monsanto-wrote-and-broke-laws-to-enter-india/> (diakses 20 Februari 2018)

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penulis akan membatasi bahasan masalah menurut fokus analisis, subjek, dan waktu. Dalam segi fokus analisis, penulis hanya akan membahas nasionalisme-ekonomi yang dilakukan oleh India terhadap bibit kapas Monsanto. Dalam membahas nasionalisme-ekonomi India, penulis hanya akan membahas nasionalisme-ekonomi India terhadap Monsanto saja sebagai sebagai subjeknya. Dalam segi waktu, penulis membatasi analisis dari 2012 saat terjadinya bunuh diri massa sampai tahun 2018 dimana peraturan baru sudah dikeluarkan.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah **bagaimana kebijakan nasionalisme ekonomi India terhadap produk *Genetically Modified Organism* (GMO) Monsanto pada tahun 2012-2018?**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon India terhadap dampak yang ditimbulkan bibit kapas rekayasa genetik oleh Monsanto dan kaitannya dengan hukum ekonomi internasional yang berlaku.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi dan gambaran yang komprehensif kepada pembaca, terutama mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang mengkaji mengenai studi ekonomi politik internasional dan kajian nasionalisme-ekonomi India.

1.4 Tinjauan Pustaka

Penulis memilih tiga kajian literatur untuk dijadikan sumber dalam penulisan kali ini. Literatur pertama bersumber dari Kacob Bunge dan Biman Mukherji yang berjudul "*Why Monsanto's Biotech-Food Business Isn't Growing in India; Seed giant's genetically-modified food crops stymied despite nation's food-security needs*" yang ditulis pada tahun 2016. Dalam literatur tersebut ditemukan fakta bahwa bibit yang telah direkayasa secara genetik atau yang dikenal dengan *Genetically Modified Organism* (GMO) telah membantu pertumbuhan 97% perkebunan kapas di India, izin GMO di India masih belum disetujui.¹⁰ Ada beberapa faktor yang membuat tidak diterimanya GMO di India, yang pertama adalah stigma dari para kelompok lingkungan, skeptis dari para petani dan hambatan birokrasi. Walaupun sudah banyak GMO di India, pemerintah masih belum mengesahkan hal itu. Selain itu juga hambatan yang ada

¹⁰ Jacob Bunge, Biman Mukherji, "Why Monsanto's Biotech-Food Business Isn't Growing in India; Seed giant's genetically-modified food crops stymied despite nation's food-security needs", Wall Street Journal: Maret, 2016.
<https://search.proquest.com/docview/1772529518/109DF0D77F7F452CPQ/3?accountid=31495> (diakses 20 Februari 2018)

adalah kebijakan pemerintah India dalam mengontrol harga bibit genetik, yang membuat Monsanto dapat keluar dari India.¹¹

Dalam literatur kedua yang ditulis oleh Biman Mukherji pada tahun 2016 dengan judul “*Monsanto Shelves Plans for New GMO Cotton Seeds in India; Decision casts a cloud over the future of genetically modified organisms in India*”, dalam literatur ini ditemukan fakta bahwa India merupakan negara penghasil kapas terbesar di dunia dengan bantuan bibit rekayasa genetik. Walaupun demikian, pemerintah India masih memiliki hambatan-hambatan yang cukup tinggi terhadap perusahaan bibit rekayasa Monsanto.¹² Kapas masih merupakan satu-satunya bibit rekayasa yang boleh beredar di India. Perusahaan Monsanto cukup mengkhawatirkan peraturan pemerintah yang membatasi perusahaan dalam harga bibit. Pengontrolan harga oleh pemerintah India dan batasan-batasan lainnya diberikan karena Monsanto telah mendominasi dalam industri bibit rekayasa, terlebih kapas.¹³

Dalam literatur ketiga yang berjudul “*Farmer-suicide in India: debating the role of biotechnology*” ditulis oleh Giges Thomas, Johan De Tavernier, ditemukan fakta bahwa petani di India hidup dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Masuknya Monsanto di India telah membuat kenaikan yang sangat tinggi terhadap harga bibit kapas, sehingga menyebabkan ketidakmampuan petani

¹¹ Ibid.

¹² Biman Mukherji, “Monsanto Shelves Plans for New GMO Cotton Seeds in India; Decision casts a cloud over the future of genetically modified organisms in India”, Wall Street Journal: Agustus, 2016. <https://search.proquest.com/docview/1813888036/109DF0D77F7F452CPQ/14?accountid=31495> (diakses 20 Februari 2018)

¹³ Ibid.

untuk membeli bibit tersebut. Hal itu menyebabkan petani di India membeli bibit kapas beserta pupuk dan pestisida secara kredit dan berhutang kepada pemberi kredit dengan bunga yang tinggi. Jika petani-petani tersebut mengalami gagal panen, maka akan membuat mereka terjebak di dalam perangkap hutang. Ditemukan fakta bahwa ketika petani-petani tersebut gagal membayar hutang mereka, mereka cenderung mengakhiri hidup mereka.¹⁴

Dari ketiga kajian literatur yang ada, peneliti dapat berkontribusi dalam pembahasan mengenai GMO di India dari segi hukum internasional yang berlaku. Peneliti akan menjabarkan seperangkat hukum internasional yang mengatur tentang GMO dan aturan dalam membatasi produk asing yang masuk ke suatu negara. Selain itu, peneliti juga akan membahas sekuritisasi isu yang India lakukan terhadap bibit Monsanto.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam studi Hubungan Internasional (HI), kerangka teori terdiri dari berbagai konsep dan definisi yang ditujukan untuk memberi pemahaman kepada para pengkaji studi HI dalam memahami fenomena-fenomena yang terjadi di berbagai belahan dunia. Struktur tersebut diharapkan dapat menyediakan dasar analisis yang dapat dilakukan dalam penelitian dengan metode-metode yang dapat

¹⁴ Gigesh Thomas, Johan De Tavernier, "Farmer-suicide in India: debating the role of biotechnology", Life Sciences, Society, and Policy: Mei, 2017. <https://search.proquest.com/docview/1957712791/abstract/E64D912A63674F41PQ/1?accountid=31495> (diakses 18 Maret 2018)

digunakan oleh pengkaji.¹⁵ Struktur yang telah dibentuk dapat kemudian dimanfaatkan oleh penulis dalam melakukan analisis penelitian untuk berbagai jenis bidang studi.¹⁶

Penulis akan menggunakan konsep kepentingan nasional dan sekuritisasi isu untuk menganalisis langkah yang diambil pemerintah India dalam menjadikan isu yang ada menjadi isu keamanan. Setelah itu, penulis akan menggunakan hukum internasional yang mengatur bibit rekayasa genetik dan penyebarannya dalam menganalisa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah India sudah sesuai dengan hukum internasional yang ada atau belum. Selanjutnya, penulis akan menggunakan teori nasionalisme ekonomi melalui indikator yang ada untuk melihat apakah pemerintah India telah melakukan nasionalisme ekonomi beserta tingkat nasionalisme ekonomi yang dilakukan.

Hubungan internasional memiliki pendekatan-pendekatan yang sangat luas, hal itu terjadi karena sifat ilmu HI itu sendiri yang bersifat multidisipliner. Salah satu pendekatan yang terdapat dalam disiplin ilmu HI adalah Liberalisme. Teori Liberalisme merupakan teori yang dapat disebut sebagai utopia atau kondisi yang diimpikan namun sulit untuk dicapai. Liberalisme muncul setelah Perang Dunia I, para penstudi ilmu Hubungan Internasional pada saat itu menyatakan bahwa perang bukanlah salah satu cara untuk memperoleh perdamaian.. Selain itu

¹⁵ Cynthia Grant dan Azadeh Osanloo, "Understanding, Selecting, and Integrating a Theoretical Framework in Dissertation Research: Creating the Blueprint for Your "House"", *Administrative Issues Journal: Connecting Education, Practice, and Research*, Vol. 4, Issue 2, 2014. Hal.12.

¹⁶ Felix Grenier, "Revisiting Theoretical Frameworks and Models in IR", *New Direction: The Future of Canadian (In)Security Studies*, ed. Lori A. Crowe, York University, 2011. Hal. 11.

juga, menurut Jackson dan Sorensen, liberalisme merupakan pandangan yang muncul sebagai tandingan dari Realisme.¹⁷ Dalam liberalisme ditekankan bahwa negara bukan lagi aktor satu-satunya di hubungan internasional. Munculnya aktor non negara merupakan hal yang perlu dipertimbangkan, hal ini disebabkan karena hal-hal yang terjadi di dunia tidak hanya berpusat pada negara saja, dan sudah berganti. Selain itu juga hal yang dibahas tidak hanya keamanan saja, tapi juga sudah ada dimensi lain yang masuk seperti ekonomi.¹⁸ Dalam liberalisme, kekuatan suatu negara tidak lagi diukur berdasarkan kekuatan militer yang dimiliki oleh negara tersebut, namun sudah ada spektrum-spektrum baru yang muncul mengukur hal tersebut, mulai dari ekonomi, damai, kerjasama, dan konsep kebebasan. Dalam liberalisme pada abad ke-19 para pakar menyatakan bahwa negara tidak boleh mengintervensi dan meregulasi ekonomi. Selain itu, pada abad 20, kemunculan aktor non-negara memiliki peran yang cukup besar dalam menjalankan ekonomi. Hal ini dilakukan karena aktor ekonomi juga memiliki peran dalam menyediakan kesejahteraan terhadap masyarakat. Selain itu ditekankan juga bahwa pengaruh dari Keynes pada saat negosiasi Bretton Woods berhasil menciptakan suatu mekanisme untuk menyelesaikan sengketa negosiasi.¹⁹

Dalam dimensi ekonomi, ada sebuah konsep yang merupakan bentuk dari liberalisme, yaitu *Laissez-faire*. *Laissez-faire* memiliki arti "biarkan terjadi",

¹⁷ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (Oxford:Oxford University Press: 2013). Hal. 34-36.

¹⁸ Ibid. 100

¹⁹ Jill Steans, dkk, *An Introduction to INTERNATIONAL RELATIONS THEORY Perspectives and Themes*. (Edinburgh: Pearson Education Limited: 2010). Hal. 26-27

istilah ini berasal dari bahasa Perancis yang dicetuskan pertama kali oleh para fisiokrat di abad ke 18 sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perdagangan.²⁰ Secara umum, istilah ini dimengerti sebagai sebuah teori ekonomi yang tidak menginginkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian, dan sering disebut juga dengan pasar bebas. Teori Laissez-faire merupakan sebuah teori yang mendorong terjadinya perdagangan bebas yang dicetuskan oleh kaum fisiokrat, tetapi teori ini juga identik dengan pandangan Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *The Wealth Of Nations* tentang mekanisme pasar bebas. Mekanisme pasar bebas itu sendiri dimana penentuan harga barang diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa adanya intervensi pemerintah.²¹

Dalam analisis mengenai fenomena hubungan internasional, pendekatan dari Kenneth Waltz dapat memberi pemahaman lebih lanjut dalam tingkatan analisa. Dalam *Man, the State, and War*, dijelaskan bahwa dalam melihat perang, ada tiga tingkatan dalam analisa mengapa perang itu terjadi. Dalam mengkaji fenomena hubungan internasional, ketiga tingkatan tersebut dapat menjadi tingkat analisis yang digunakan.²² Ketiga tingkatan tersebut adalah, tingkat sistem, tingkat negara, dan tingkat individu. Dalam analisis studi kasus ini akan menggunakan tingkat analisa negara. Dalam analisa tingkat negara ditekankan bahwa kebijakan luar negeri tidak dibuat oleh satu negara secara menyeluruh, namun dibuat oleh

²⁰ Jacob Viner, "Adam Smith and Laissez-faire", *Journal of Political Economy* Vol. 35, No. 2, 1927. Hal. 198-232

²¹ Ibid.

²² Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (Oxford:Oxford University Press, 2013). Hal. 257

pemerintah negara tersebut. Oleh karena itu pada tingkat analisis negara, pemerintah yang dimana mewakili proses pengambilan keputusan di negara tersebut, merupakan aktor utama yang di akan dikaji.²³

Dalam proses pencapaian kepentingan nasional, pengaplikasian kebijakan pemerintah pun diperlukan. Karena dalam proses pencapaian tujuan dari kepentingan nasional tidaklah terlepas dari kekuatan atau *power* seperti mengontrol aktor lain agar kepentingan nasional suatu negara dapat terwujud. *“The greater the stability of society and the sense of security of its members, the smaller are the chances for collective emotions to seek an outlet in aggressive nationalism and vice versa”*²⁴

Menghubungkan negara dalam menjalankan praktik ekonomi kenegaraannya, merkantilisme dapat membantu untuk melihat bagaimana upaya negara dalam mengatasi fenomena ekonomi yang ada. Merkantilisme merupakan upaya sebuah bentuk kebijakan nasionalisme-ekonomi yang mengutamakan perdagangan. Dalam merkantilisme ditekankan bahwa banyaknya upaya pemerintah dalam mengatur kebijakan ekonomi supaya negara tersebut dapat bersaing dengan negara lain. Kebijakan yang diambil oleh negara biasanya untuk mencapai keseimbangan moneter melalui perdagangan yang positif, terlebih barang jadi.²⁵ Selain itu juga, penetapan tarif yang tinggi merupakan salah satu bentuk merkantilisme yang terjadi hampir di seluruh dunia. Merkantilisme

²³ Ibid.

²⁴ Neta C. Crawford, “The Passion of World Politics: Propositions on Emotion and Emotional Relationships.” *International Security*, Vol. 24, No. 4, 2000, Hal. 116–156

²⁵ Laura LaHaye, “Mercantilism”, *The Concise Encyclopedia of Economics*, 2008.

merupakan sebuah teori ekonomi dan sebuah praktik yang banyak ditemukan di Eropa pada abad 16 sampai dengan abad 18. Dalam merkantilisme dinyatakan tentang regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani saingan ekonomi yang dapat muncul. Hal ini merupakan bentuk absolutisme dalam ekonomi.²⁶

Adam Smith menyatakan bahwa merkantilisme adalah sebuah keseimbangan dagang yang diinginkan, pemikiran yang dikeluarkan oleh Smith merupakan penjelasan lebih lanjut dari apa yang telah dicetuskan oleh Thomas Mun sebelumnya. Pemikiran Smith mengenai merkantilisme merupakan sebuah regulasi negara dan praktik proteksionisme untuk melindungi perekonomian negara tersebut.²⁷ Merkantilisme tergolong dalam aspek ekonomi dari penyelenggaraan sebuah negara dan hal tersebut diformulasikan dalam bentuk kebijakan ekonomi negara tersebut.²⁸ Selain daripada itu, merkantilisme merupakan salah satu upaya yang negara lakukan dalam mencapai kepentingan nasionalnya.²⁹ Upaya negara dalam mengerahkan kewenangannya dalam mengatur kegiatan ekonomi seringkali berlawanan dengan aktor lain, sehingga dalam hal ini terlihat bagaimana kekuatan negara dalam menghadapi kondisi ekonomi yang berlangsung.³⁰

²⁶ Charles P. Kindleberger, *Historical Economics: Art or Science?*, (Berkeley: University of California Press, c1990 1990). Hal 86-94.

²⁷ Eli F. Heckscher, *Merchantilism*, (London: Routledge, 1935). Hal. 1

²⁸ Ibid. Hal. 20

²⁹ Ibid. Hal. 24

³⁰ Ibid.

Pemikiran yang dicetuskan oleh D'Costa menunjukkan perbedaan antara nasionalisme ekonomi defensif dan agresif. D'Costa mengacu pada negara Cina yang dimana nasionalisme ekonomi

defensif terlihat dalam perlindungan pasar domestik dengan menolak masuknya bisnis internasional. Bentuk nasionalisme ekonomi agresif menurut D'Costa adalah "menjelajah pasar global".³¹ dengan cara berinvestasi dan mendorong bisnis nasional level global. Pemikiran ini didukung oleh Levi dan Faur, mereka menambahkan gagasan ini dengan menyatakan bahwa nasionalisme ekonomi defensif adalah hasil dari ketegangan antara kebijakan ekonomi nasional dan konsekuensi internasionalnya. Kebijakan ekonomi nasional dapat memberikan efek positif bagi negara (melalui peningkatan ekspor), namun disisi lain juga dapat membahayakan tingkat internasional / supranasional (impor meningkat di negara-negara lain).³²

Dalam nasionalisme ekonomi agresif, D'Costa menjelaskan bahwa pemerintahan yang agresif dapat menggunakan sistem perdagangan untuk memperoleh keuntungan mereka sendiri dengan cara yang mungkin menyalahgunakan kebijakan ekonomi nasional lainnya.³³ Perdagangan dalam aspek ini tidak hanya mengacu pada barang; hal ini juga mengacu pada modal. Selain contoh nasionalisme ekonomi yang dilakukan oleh Cina, Levi dan Faur

³¹ D'Costa, "Globalization and Economic Nationalism in Asia", (Oxford Scholarship Online: 2012).

³² David Levi-Faur, "The European Union and economic nationalism – from antithesis to synthesis" Prepared for the fourth Biennial International Conference, 1995. Hal. 15

³³ Ibid. Hal. 17

menyatakan bahwa negara yang hanya mengekspor tanpa mengimpor dan berinvestasi di pasar internasional dan tidak membuka pasar nasional untuk investor asing, adalah contoh lain nasionalisme ekonomi."³⁴

Dalam penelitian ini, teori nasionalisme ekonomi di pasar liberal dianggap berlaku untuk India. India masih dan ingin tetap bertanggung jawab secara ekonomi untuk pasar domestik, dan secara politik bagi negara bangsa dalam praktek bernegara oleh India.

Satu aspek lainnya yang disebutkan oleh D'Costa adalah keunggulan kompetitif yang diberikan kepada perusahaan domestik. Situasi ini terjadi di India dengan cara yang sama juga, namun mungkin memiliki tingkat visibilitas yang berbeda dengan apa yang terjadi di Cina. Aspek ini dinilai lebih ringan dibandingkan dengan memberi batasan-batasan lainnya untuk mencapai pasar tunggal (monopoli).³⁵

Clift dan Woll menyebutkan beberapa kemungkinan mendukung domestik dan membatasi pihak asing, baik dalam bentuk liberal maupun proteksionis. Meskipun mereka lebih fokus terhadap patriotisme ekonomi, teori yang mereka cetuskan juga dapat diterapkan dalam nasionalisme ekonomi. Clift dan Woll menyebutkan dua konsep utama yang diperlukan dalam menganalisa patriotisme ekonomi. Konsep pertama adalah bentuk proteksionisme klasik yang merupakan "kebijakan yang berusaha mempertahankan status quo, baik dengan mempertahankan produk nasional atau meregulasi proses yang akan bermanfaat

³⁴ Ibid. Hal. 17

³⁵ D'Costa, "Globalization and Economic Nationalism in Asia", (Oxford Scholarship Online: 2012).

bagi perusahaan (mendukung perusahaan nasional) atau dengan menerapkan hambatan perdagangan klasik (memberi hambatan terhadap produk luar)".³⁶ Bentuk kedua adalah nasionalisme ekonomi liberal yang merupakan “kebijakan yang bertujuan untuk meliberalisasi sektor tertentu, kebijakan ini dilakukan dengan cara memfokuskan industri di mana pemerintah mendapatkan keuntungan strategis dan memiliki kemungkinan untuk mendominasi di pasar.

Meskipun konsep yang dicetuskan oleh Clift dan Woll sudah mencakup untuk penelitian ini, konsep penting lainnya yang diperlukan dikaitkan dengan nasionalisme ekonomi: hubungan dengan tatanan internasional yang ada. Penjabaran mengenai nasionalisme ekonomi seperti itu berasal dari konsep nasionalisme ekonomi yang dicetuskan oleh Cohen:

“Malign nationalism seeks national goals relentlessly, even at the expense of others; benign nationalism is prepared to compromise national policy priorities where necessary to accommodate the interests of others. Another difference between these two types of nationalisms lies in the willingness of a country to identify its own national interest with an interest in the stability of the overall international system. Benign nationalism acknowledges a connection between self-interest and systemic interest; malignant nationalism ignores or denies it.” (Levi Faur 1997, p. 367)

Cohen mendefinisikan pihak luar yang terdapat dalam dalam nasionalisme ekonomi sebagai konsep yang merujuk pada tingkat nasional, negara-negara

³⁶ Clift, B. and Woll, C., “Economic patriotism: reinventing control over open markets”, *Journal of European Public Policy*, 2012. Hal. 317

anggota, dan tatanan internasional secara keseluruhan, sementara konsep pihak luar yang dicetuskan oleh Clift dan Woll mengacu pada tingkat negara.³⁷

Tujuan nasionalisme ekonomi, ada sejumlah alasan yang berbeda yang negara pertimbangkan dalam penggunaan nasionalisme ekonomi, hal ini didasari pada bagaimana respon negara dalam menanggulangi masalah nasional, dan respon tersebut merupakan faktor pendukung dari penerapan teori-teori ekonomi proteksionis.³⁸ Tanggung jawab politik termasuk dalam alasan utama yang muncul dalam literatur melalui konsep ekonomi, bangsa, kekuasaan, dan identitas sosial. Abdelal menekankan bahwa nasionalisme ekonomi tidak setara dengan statisme; dia juga menambahkan dimensi lain pada konsep nasionalisme ekonomi dengan memasukkan aspek sosial.³⁹ Nasionalisme ekonomi tidak hanya berfokus pada nasionalisme negara melalui sarana ekonomi, nasionalisme ekonomi juga berfokus pada nasionalisme negara-bangsa, dengan demikian termasuk identitas nasional, melalui sarana ekonomi, menurut Nakano.⁴⁰ Nakano menyebutkan bahwa kebijakan yang mempertimbangkan "ekonomi politik dalam pengertian bangsa dan bukan kelas"⁴¹ adalah bentuk dari nasionalisme ekonomi. Dalam pengertian ini, kebijakan-kebijakan yang "merongrong persatuan bangsa" sebisa

³⁷ Ibid. 307-323

³⁸ C.A. Fölster, "The new rise of economic nationalism in transatlantic trade relations", Unpublished master's thesis for master's degree University of North Carolina, Chapel Hill, 2009.

³⁹ Rawi Abdelal, "Nationalism and international political economy in Eurasia" in *Economic nationalism in a globalizing world*, (Ithaca: Cornell University Press, 2005).

⁴⁰ Takeshi Nakano, "Theorising economic nationalism" *Nations and Nationalism*, 2004, Hal. 211-229

⁴¹ Ibid.

mungkin dihindari dan dengan demikian perlu ditekankan pentingnya negara bangsa secara keseluruhan.⁴²

Negara dalam melakukan perlindungan terhadap industri dan pasar domestik memiliki cara yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada faktor-faktor yang melatarbelakangi mengapa negara melakukan hal tersebut, menciptakan lapangan pekerjaan, menambah uang negara, dan mendapatkan keseimbangan dagang.⁴³ Tiga hal tersebut merupakan hal utama yang dijadikan perlindungan sebuah negara dalam melakukan hambatan dagang. Hal ini dilihat oleh para pengamat ekonomi sebagai solusi jangka pendek dan dapat berakibat buruk untuk jangka panjang. Adanya kepentingan nasional dalam melakukan hambatan dagang, seperti melindungi industri domestik dari perdagangan yang tidak adil dari negara lain.⁴⁴

Indikator-indikator seperti identitas umum, kesejahteraan umum, kemakmuran dan kekuatan negara-bangsa, yang dijabarkan oleh Gonzalez, mencakup bagian penting dari nasionalisme ekonomi, namun, ketiga indikator tersebut merupakan sebuah hal sulit untuk diukur, sehingga indikator ini dinyatakan belum memadai untuk digunakan dalam penarikan kesimpulan yang memadai tentang hubungan antara indikator dengan nasionalisme ekonomi. Karen Sleen memformulasikan empat indikator yang lebih mudah diukur.

⁴² Ibid. 222-223

⁴³ Eduardo T. Gonzalez, "Between Economic Nationalism and Economic Liberalism: An Alternative View", 2010.

⁴⁴ Ibid.

Pertama, tujuan yang paling jelas dari nasionalisme ekonomi adalah memberikan perlindungan terhadap industri domestik dengan cara memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pihak luar, dan dengan membatasi kegiatan pihak luar di pasar domestik.⁴⁵ Ancaman dari pihak luar dikhawatirkan dapat mempengaruhi industri domestik.

Besar kemungkinan negara-negara akan menerapkan langkah-langkah nasionalisme ekonomi karena ancaman yang datang dari pihak luar dapat mempengaruhi pasar domestik secara negatif.⁴⁶ Fakta bahwa industri domestik suatu negara merupakan hal yang signifikan, dapat menjadi alasan bagi negara-negara untuk melindungi pasar domestiknya dan memberikan bantuan terhadap industri tersebut.⁴⁷

Kedua, swasembada yang disengaja dan tidak disengaja. Dinamika ekonomi nasional dipengaruhi oleh beragam aktor yang memiliki kepentingan pribadinya masing-masing. Kepentingan pribadi setiap aktor menjadi salah satu faktor penggerak yang penting bagi ekonomi nasional.⁴⁸ Setiap aktor akan selalu berusaha mengambil opsi terbaik yang tersedia untuk melindungi pasar domestik yang dianggapnya sesuai dan mencapai kepentingan pribadinya. Dalam hal ini, negara memiliki dua cara untuk menciptakan perekonomian nasional yang mampu

⁴⁵ Ben Clift, dan Cornelia Woll, "Economic patriotism: reinventing control over open markets", *Journal of European Public Policy*, 2012. Hal. 307-323

⁴⁶ Dirk Schoenmaker, "Contagion risk in banking", *LSE Financial Markets Group*, No.239, 1996.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

berdiri sendiri. Kedua cara tersebut adalah swasembada yang disengaja dan swasembada sebagai produk sampingan atau hasil tambahan.⁴⁹

Swasembada yang disengaja tersusun dari ide-ide kebijakan yang terfokus untuk menggunakan nasionalisme ekonomi dalam rangka melindungi pasar setiap negara anggota. Doktrin ini pun dinilai lebih agresif dan hanya fokus kepada perkembangan diri sendiri.⁵⁰ Hal ini dikarenakan doktrin ini berfokus untuk menguntungkan negara sendiri dengan cara secara aktif menyerang negara-negara lain atau menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi negara-negara tersebut.⁵¹ Doktrin ini menempatkan swasembada sebagai tujuan utama yang harus dicapai setiap negara. Kepentingan negara menjadi motivasi utama bagi arah kebijakan ekonomi.⁵² Hal ini memiliki arti bahwa setiap kebijakan ekonomi yang dikeluarkan harus sejalan dengan tujuan pembangunan negara dan kepentingan negara itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan setiap tindakan ekonomi yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi seluruh aspek dalam negara tersebut.⁵³

Pelaksanaan dari doktrin swasembada yang disengaja juga tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Para ahli menyadari adanya anarki yang menjadi sifat natural hubungan internasional, pentingnya hubungan antar negara yang semakin meningkat setiap waktunya, dan pentingnya kekuatan dalam hubungan

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Michael A. Heilperin, "Studies in economic nationalism", (Ludwig von Mises Institute: 1960).

⁵¹ Robert Gilpin, "Global political economy, understanding the international economic order", (United Kingdom: Princeton university press, 2001).

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

internasional.⁵⁴ Aspek-aspek tersebut mencegah terlalu kerasnya permainan rasa nasionalisme dalam praktik ekonomi negara dikarenakan setiap negara tetap membutuhkan negara-negara lainnya untuk berkembang. Bentuk kerja sama supranasional menjadi model yang baik untuk mencegah setiap negara bertindak terlampaui agresif terhadap satu sama lain yang akhirnya hanya akan berujung kepada kehancuran.⁵⁵

Swasembada yang muncul sebagai produk sampingan merupakan swasembada yang terjadi dari beberapa kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya selain swasembada. Dalam hal ini, ekonomi nasional dilihat sebagai ekonomi sebagaimana konsepnya, yaitu sebagai tindakan yang dilakukan sebagai reaksi alami terhadap krisis yang terjadi.⁵⁶ Indikator-indikator yang membentuk nasionalisme ekonomi itu pun tidak terbentuk dari latar belakang sejarah, institusi, atau pun budaya. Secara singkat, dalam doktrin ini nasionalisme ekonomi dipandang sebagai aksi - reaksi logis antara tindakan ekonomi dan krisis yang terjadi.⁵⁷

Ketika negara mengutamakan ekonomi nasionalnya secara egois, bentuk swasembada yang disengaja dapat diindikasikan sebagai nasionalisme ekonomi

⁵⁴ Eric Helleiner, "Economic nationalism as a challenge to economic liberalism? Lessons from the 19th century", *International studies quarterly* 46, 2001. Hal. 307-329

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ C.A. Fölster, "The new rise of economic nationalism in transatlantic trade relations", Unpublished master's thesis for master's degree University of North Carolina, Chapel Hill, 2009.

⁵⁷ Andreas Pickel, "Introduction: False Oppositions – Recontextualizing Economic Nationalism in a Globalizing World.", (New York: Cornell University Press. 2005).

yang merusak, hal itu dikarenakan akan merusak kerjasama dan kerangka internasional. Rusaknya kerangka internasional ini akan merusak hubungan negara dengan negara-negara lainnya sehingga pada akhirnya akan merusak ekonomi domestik negara yang bersangkutan. Walaupun begitu, munculnya konsep baru yang mengharuskan swasembada untuk diperoleh dengan cara jinak atau liberalisasi nasionalisme ekonomi merupakan hal yang lebih sulit. Hal ini dikarenakan proses tercapainya dapat tercipta secara sengaja maupun tidak sengaja sehingga tingkat kontrol dan kepastian yang ada sangatlah kecil. Potensi terciptanya kekacauan pun menjadi lebih besar. Maka dari itu, konsep tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai indikator dari nasionalisme ekonomi.

Ketiga, peran dari kekuatan. Kekuatan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan kekuatan menjadi penentu dalam hubungan para pemegang otoritas dengan pasar.⁵⁸ Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui nasionalisme ekonomi juga memperhatikan peranan penting dari kekuatan tersebut. Dalam rangka mencapai kekuatan politik dan ekonomi, nasionalisme ekonomi haruslah terlihat dan merambah ke dalam tatanan supranasional dan internasional.⁵⁹ Hal ini juga merupakan dampak tidak langsung dari para pemegang otoritas yang berada dalam waktu dan situasi di mana pasar berfungsi. Saling keberadaan setiap negara pun dan kerja sama yang muncul setelahnya tak muncul dengan semata-mata tapi merupakan resiko dari keberadaan yang saling muncul tersebut. Dalam hubungan ini, terdapat sebuah

⁵⁸ Susan Strange, "States and markets", (United Kingdom:Printer Publishers, 1988).

⁵⁹ Ibid. Hal. 23

resiko dan ketakutan yang tak dapat diprediksi, yaitu sampai kapan dan sejauh apa sebuah negara dapat mengembangkan kekuatannya dan pada titik apa negara-negara lemah harus menghentikan kerjasamanya dan berbalik menyerang untuk menghalau munculnya satu kekuatan yang begitu besar.⁶⁰

Institusi itu sendiri tak muncul dengan sendiri dalam waktu yang singkat. Dibutuhkan proses sejarah yang panjang untuk akhirnya dapat menghasilkan sebuah institusi, proses yang lebih panjang diwarnai dengan stabilitas yang kuat akan menghasilkan institusi yang kuat dan dapat bertahan lama.⁶¹ Institusi-institusi yang muncul merupakan hasil dari interaksi-interaksi satu sama lain sehingga selalu dapat ditemukan benang merah atau hubungan di antara institusi-institusi yang ada. Saling keterhubungan antar institusi ini pun akhirnya dapat saling menstabilkan jalannya setiap institusi tersebut.⁶²

Keempat, dua konsep yang penting dalam nasionalisme ekonomi yang dapat digunakan oleh negara dalam memperkuat ekonomi, adalah intervensi dan proteksionisme.

Dapat dikatakan bahwa proteksionisme membatasi kehadiran pihak luar di pasar domestik secara langsung, sementara intervensi negara hanya sebatas memberikan bantuan dan tidak membatasi persaingan asing.

Pandangan lain yang dijabarkan oleh Clift dan Woll melihat proteksionisme sebagai seperangkat peraturan ketat tentang langkah-langkah dan

⁶⁰ Ibid. Hal. 50

⁶¹ Andreas Busch, "Banking regulation and globalization", (United Kingdom:Oxford University Press, 2009).

⁶² Ibid.

kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mendukung industri domestik, dan atau melawan pihak luar. Intervensi yang negara lakukan di sisi lain memiliki tujuan tidak hanya untuk melindungi pasar domestik (yang juga merupakan tujuan proteksionisme) tetapi juga untuk memberikan bantuan kepada industri domestik.⁶³ Mereka mengakui adanya beberapa macam bentuk implementasi negara dalam mengintervensi. Hal tersebut merupakan langkah-langkah yang memiliki efek yang sama seperti proteksionisme, dalam hal memihak kondisi domestik dan atau melawan pihak luar. Industri domestik dapat memiliki keunggulan kompetitif atas pihak melalui bantuan ini. Proteksionisme bergantung pada pembuatan peraturan yang lebih kuat, intervensi negara dapat terjadi baik dalam peraturan liberalisasi dan atau memperkuat regulasi.⁶⁴

Intervensi yang dilakukan oleh sebuah negara dapat menjadi sarana nasionalisme ekonomi, tetapi hal tersebut juga dapat terjadi dalam liberalisme ekonomi juga. Clift dan Woll menjelaskan bahwa ada banyak bentuk liberalisme ekonomi, dan menurut Polanyi, "pasar liberal membutuhkan intervensi negara yang konstan".⁶⁵ Intervensi negara juga dapat menjadi karakteristik dari liberalisme ekonomi, oleh karena itu intervensi negara tidak akan cukup untuk dianggap sebagai indikator dalam nasionalisme ekonomi. Proteksionisme, di sisi

⁶³ Ben Clift, dan Cornelia Woll, "Economic patriotism: reinventing control over open markets", *Journal of European Public Policy*, 2012. Hal. 307-323

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

lain, yang dianggap sebagai tindakan diskriminatif dengan membuat peraturan lebih ketat, merupakan indikator yang baik dari nasionalisme ekonomi.⁶⁶

Bentuk proteksionisme nasional tidak terlalu diinginkan di pasar karena akan menghambat aktivitas dagang, lain halnya dengan intervensi negara, intervensi dapat dianggap sebagai alat pendukung dalam nasionalisme ekonomi dan liberalisme ekonomi.

Cohen mencetuskan tiga bentuk nasionalisme ekonomi, salah satu dari bentuk nasionalisme ekonomi ini dapat diidentifikasi dan akan digunakan dalam penelitian ini; nasionalisme ekonomi parah, nasionalisme ekonomi jinak dan nasionalisme ekonomi liberal.⁶⁷

Pertama, bentuk nasionalisme ekonomi yang dianggap paling buruk adalah nasionalisme ekonomi yang parah. Sebagaimana dengan yang dijelaskan oleh Cohen, bentuk ekonomi nasionalisme ini memprioritaskan kepentingan negara-bangsa, negara akan terus mencari dan mengejar tujuan nasionalnya, dengan mengorbankan pihak lain.⁶⁸ Nasionalisme ekonomi yang parah ini dapat diidentifikasikan dengan adanya dukungan pemerintah terhadap perusahaan nasional dan / atau membatasi pihak asing melalui peraturan-peraturan yang lebih ketat. Selanjutnya nasionalisme ekonomi yang parah juga dapat terlihat dari upaya pemerintah dalam memperkuat regulasi yang ada.⁶⁹

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Benjamin Cohen, "Crossing Frontiers: Explorations in International Political Economy", (Boulder, CO, 1991). Hal. 47

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

Kedua, bentuk nasionalisme ekonomi ekonomi jinak merupakan bentuk yang lebih ringan karena bentuk ini mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Dalam bentuk ini negara dapat bernegosiasi mengenai prioritas kebijakan nasional dan mengakui hubungan antara kepentingan negara dan kepentingan pihak lain.⁷⁰ Hal yang dapat dijadikan indikator dalam bentuk ini serupa dengan nasionalisme ekonomi yang parah, tetapi negara masih mengakui dan menghormati peraturan internasional dan bertindak dalam batasan yang ada.

Ketiga, nasionalisme ekonomi liberal memiliki indikator yang hampir sama dengan nasionalisme ekonomi ringan, nasionalisme ekonomi liberal juga memiliki liberalisasi industri, selama pihak yang terlibat ada di dalamnya mendapatkan manfaat. Namun ada perbedaan vital dalam jenis nasionalisme ekonomi liberal yaitu, liberalisasi regulasi.

Sekuritisasi, merupakan salah satu pemikiran yang paling dikenal dan menjadi ciri khas dari *Copenhagen School*. Barry Buzan, Ole Waever, serta beberapa pemikir disebut kelompok pemikir *Copenhagen School* memelopori perluasan kajian keamanan tradisional menuju keamanan yang membahas isu-isu non-tradisional. Kelompok ini juga menghasilkan beberapa pemikiran seperti *regional security complex theory* (RSCT), *European security*, serta hubungan antara keamanan regional dan global.⁷¹

Posisi dari *Copenhagen School* berada diantara keamanan tradisional yang cenderung *state-centrism* dan keamanan kritis yang memiliki fokus pada individu

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Barry Buzan, *Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations*, (London: Macmillan, 1987).

atau *global security*. Aliran keamanan yang dianut oleh *Copenhagen School* lebih kepada *societal security* atau keamanan masyarakat. Berbeda dengan *referent object* yang dimiliki oleh keamanan tradisional yang adalah negara dan *global security* yang memiliki *referent object* individu, keamanan masyarakat dari *Copenhagen School* merujuk pada dua hal utama, yaitu negara dan masyarakat. *Copenhagen School* tidak mengarah kepada keamanan individu, hal tersebut dijelaskan oleh Ole Weaver.⁷²

Alasan dari Ole Weaver adalah:

*“it seems reasonable to be conservative along this [referent object] axis, accepting that “security” is influenced in important ways by dynamics at the level of individuals and the global system, but not by propagating unclear terms such as individual security and global security.”*⁷³

Weaver melihat bahwa adanya ketidakjelasan dari penjelasan mengenai keamanan individu dari pendekatan *global security*. Hal tersebut membuat pemikir-pemikir *Copenhagen School* merujuk pada keamanan masyarakat. Keamanan masyarakat berfokus pada kemungkinan atau ancaman yang aktual, dimana aktor politik sebagai aktor utama yang dapat menunjukkan sumber ancaman dan identitas yang terancam.⁷⁴ Keberhasilan suatu aktor dalam menunjukkan suatu isu menjadi sebuah ancaman bergantung pada keberhasilan aktor dalam meagendakan sebuah isu menjadi isu keamanan. Pola tersebut

⁷² Ibid.

⁷³ Barry Buzan & Lene Hansen, *The Evolution of International Security Studies*, (New York: Cambridge University Press, 2009). Hal. 213

⁷⁴ Ibid.

merupakan konsep yang dikembangkan oleh Weaver yang dikenal dengan istilah sekuritisasi.

Ada tiga hal yang utama dalam mengkaji Sekuritisasi, yaitu *speech act*, pendekatan *Schmittian* terkait keamanan dan politik, serta asumsi yang ada di pendekatan keamanan tradisional. Aktor keamanan melakukan sekuritisasi untuk menghilangkan suatu ancaman yang sifatnya non-tradisional; lingkungan, ekonomi, kemiskinan, dll. Perubahan dan eskalasi yang dilakukan aktor untuk merubah isu non-keamanan menjadi isu keamanan dilakukan melalui proses sekuritisasi.⁷⁵ Terkait dengan hal ini, Buzan menyatakan bahwa:

*“traditionally, by saying “security,” a state representative declares an emergency condition, thus claiming a right to use whatever means are necessary to block a threatening development.”*⁷⁶

Dari pernyataan yang Buzan berikan, dapat terlihat bahwa negara merupakan aktor utama dalam proses sekuritisasi. Negara berhak melakukan sekuritisasi untuk melakukan tindakan terhadap suatu ancaman. Namun, ada beberapa hal yang negara perlu perhatikan ketika melakukan proses sekuritisasi.

Pertama, aktor melakukan identifikasi terhadap suatu isu yang tujuannya merubah isu tersebut menjadi isu keamanan, hal ini dinamakan sebagai proses sekuritisasi. Aktor yang melakukan sekuritisasi disebut sebagai *securitizing actors*. Buzan mendefinisikan aktor sebagai, *“who securitize issues by declaring*

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Barry Buzan, *Op. Cit.*, Hal. 21

something – a referent object – existentially threatened.”⁷⁷ *Referent object* yang dimaksudkan disini adalah suatu objek (negara atau masyarakat) yang keberadaannya dipandang terancam dan harus diamankan. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah hanya negara merupakan aktor tunggal dalam melakukan sekuritisasi? Buzan memiliki pandangan bahwa negara bukanlah aktor satu-satunya, pada prinsipnya sekuritisasi dapat dilakukan oleh siapapun.⁷⁸ Akan tetapi, pada prakteknya, tindakan sekuritisasi cenderung dilakukan oleh pemimpin politik, birokrasi, pelobi, kelompok oposisi, serta kelompok organisasi lainnya.

Aktor melakukan sekuritisasi apabila suatu isu dipandang sangat mendesak. Terdapat beberapa klasifikasi isu, seperti: pertama, isu publik (*non-politicised*) dimana negara tidak mengambil tindakan terhadap isu tersebut. Kedua, politisasi, dimana isu yang ada dimasukkan negara sebagai *input* dalam suatu kebijakan. Ketiga, sekuritisasi, dimana negara menangani isu melalui tindakan cepat dan bahkan “melanggar” aturan hukum yang ada.⁷⁹

Buzan memposisikan sekuritisasi sebagai:

“Security” is the move that take politics beyond established rules of the game and frames the issue either as a special kind of politics or as above politics. Securitization can thus be seen as a more extreme version of politicization.”⁸⁰

Buzan menyatakan bahwa posisi dari keamanan berada pada bentuk khusus dari politik. Sekuritisasi terkadang dapat dilihat sebagai suatu hal yang

⁷⁷ Barry Buzan & Eric Herring, *The Arms Dynamic in World Politics*, (Boulder: Lynne Rienner: 1998)

⁷⁸ Barry Buzan & Lene Hansen, *Op. Cit.*, Hal. 214

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

lebih ekstrim dari politisasi. Selama terdapat ancaman yang nyata dari isu yang ada, sekuritisasi dapat dilakukan terhadap isu yang dipolitisasi maupun tidak. Apabila sebuah isu dianggap sebagai ancaman, maka aktor sekuritisasi dapat melakukan sekuritisasi. Suatu isu dapat dikatakan sebagai ancaman ketika negara melakukan tindakan wacana yang menyatakan isu tersebut merupakan ancaman, serta terdapat aktor lain (masyarakat) yang menyetujui hal tersebut. Proses inilah yang merupakan inti dari tindakan sekuritisasi.⁸¹

Kedua, kondisi pendukung dalam proses sekuritisasi (*facilitating conditions*), hal ini merupakan sebuah keadaan yang memiliki kemampuan untuk memperkuat opini publik terhadap suatu ancaman yang disekuritisasi. Ketiga, unit analisa keamanan (*the units of security analysis: actors and referent objects*); yaitu aktor yang menjadi rujukan sekuritisasi (negara atau masyarakat).Keempat, Buzan kemudian menyebutkan *speech-act*, yaitu istilah yang dilakukan aktor sekuritisasi terhadap suatu isu yang dinilai sebagai ancaman.⁸² Adapun *speech-act* yang dilakukan berdasarkan pada:

“referent objects: things that are seen to be existentially threatened and that have a legitimate claim to survival. Securitizing actors: actors who securitize issues by declaring something a referent object- existentially threatened. Functional actors: actors who affect the dynamics of a sector. Without being the

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

*referent object or the actor calling for security on behalf of the referent object, this is an actor who significantly influences decisions in the field of security.*⁸³

Gagasan terkait *speech act* dapat dikaitkan dari filsuf J.L. Austin, yang menurutnya istilah *speech act* bukan hanya merujuk pada pernyataan melainkan juga tindakan.⁸⁴ Wacana keamanan menjadi hal khusus dari kegiatan komunikatif untuk menghasilkan efek tertentu pada pendengar. Seperti yang dinyatakan oleh Waever yaitu, “‘security’ is to give what is proposed the particular significance attached to dealing with ‘existential threats’ and ‘extraordinary measures.’”⁸⁵ Jadi, wacana atau penamaan mengenai keamanan digunakan untuk memberikan makna politik tertentu. Kata ‘keamanan’ dalam wacana politik menandakan prioritas. Jika presiden atau perdana menteri suatu negara mengumumkan bahwa bencana alam merupakan masalah ancaman terhadap keamanan, berarti segala sumber daya negara harus diprioritaskan dalam menghadapi ancaman tersebut.⁸⁶

Kelima, konstelasi sekuritisasi (*constellations of securitization*); proses pemetaan terkait *security complex*, yang bertujuan untuk menganalisis pola keterkaitan keamanan dari beberapa kompleksitas keamanan yang berbeda. Adapun analisis dapat dilakukan melalui tiga cara:

“is the issue securitized successfully by any actors? If yes, track the links and interactions from this instance-how does the security of others, and where

⁸³ Nuraini Chandrawaty, “Perkembangan Konsep-Konsep Keamanan dan Relevansinya terhadap Dinamika Keamanan Negara Berkembang”, Vol.2, 2002. Hal. 35- 36

⁸⁴ Ken Booth, *Op. Cit.*, Hal 106

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

*does this then echo significantly? These cains can then be collected as a cluster of interconnected security concerns.*⁸⁷

Analisis dari pola keamanan dapat dilihat melalui pendekatan yang digunakan untuk melihat korelasi antar sistem keamanan. Adapun proses yang dilalui meliputi tiga langkah, seperti: apakah isu tersebut diwacanakan oleh aktor sekuritisasi? Apabila 'iya', maka harus dicari bagaimana korelasi antara isu, aktor, dan interaksinya. Selanjutnya, korelasi antara tiga hal inilah yang nantinya dikumpulkan sebagai data untuk melihat korelasi dalam masalah keamanan. Selain itu, sekuritisasi turut terkait dengan terminologi ancaman yang bersifat nyata (*existential threat*), yang ancamannya berada pada beberapa sektor yang berbeda-beda, seperti: sektor ekonomi, sektor militer, sektor politik, sektor sosial, serta sektor lingkungan.

Lalu, bagaimana ketika suatu ancaman sudah diatasi? Sekuritisasi yang dilakukan terhadap suatu isu identik dengan penggunaan militer dalam mengatasinya. Apabila suatu ancaman dapat diatasi, isu keamanan yang ada diturunkan kategorinya menjadi isu politis melalui '*de-securitize*'.⁸⁸ Menurut Booth, pengkategorian suatu isu menjadi isu keamanan harus terlebih dahulu ditetapkan melalui kriteria yang ketat, sehingga dapat dibedakan dalam rangka mengatasi isu yang ada.⁸⁹ Selain itu, dukungan terhadap tindakan darurat turut menjadi *concern* dari aktor sekuritisasi dalam mengatasi ancaman.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ole Waever, *Securitization and Desecuritization*, (New York: Columbia University Press:1995). Hal. 46-86

⁸⁹ Ibid.

Dalam kerangka teori yang sudah dijabarkan, di Denmark, para pakar yang tergabung ke dalam Mazhab Kopenhagen (Copenhagen School) menginisiasi Teori Sekuritisasi (*Securitization Theory*) yang pada dasarnya menyatakan bahwa isu yang tadinya bukan merupakan isu keamanan (*security*) dapat disekuritisasi (dibuat menjadi isu keamanan) apabila aktor pembuat sekuritisasi (*securitizing actors*) melalui seruannya (*speech acts*) dapat meyakinkan publik bahwa isu tersebut sungguh-sungguh isu keamanan karena mengandung unsur ancaman bagi keselamatan manusia.

1.6 Metode dan Jenis Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian yang dilakukan akan berpusat pada pengujian teori serta menemukan hubungan kausal antara variabel dependen dan independen pertanyaan penelitian ini. Penulis akan mendeskripsikan situasi yang terjadi dalam permasalahan penelitian. Proses tersebut akan dilakukan penulis melalui analisis teks, dokumen, dan data terkait lain yang tersedia.⁹⁰

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta, Bandung, 2007). Hal. 9

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian dengan jenis deskriptif ini, penulis akan menggunakan data berupa buku, artikel, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya, baik dalam bentuk fisik maupun digital yang diperoleh dari situs web. Selain itu, penulis mengutamakan penggunaan data primer yang dipublikasikan secara resmi oleh institusi-institusi terkait.⁹¹

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dijabarkan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini akan membahas dasar dari penelitian, yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, kajian literatur, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan

Bab II: Perjanjian internasional mengenai *Genetically Modified Organism* di dunia dan perkembangan produk Monsanto di India.

Bab ini akan menjelaskan bagaimana Monsanto dapat masuk dan melakukan penjualan GMO di India dan pengaturan *genetically modified*

⁹¹ Ibid.

organism dalam perjanjian Internasional. Bab ini juga akan membahas bagaimana penggunaan bibit GMO oleh petani kapas India dan berakhir dengan *mass-suicide* dari petani kapas. Selain itu, dampak negatif yang disebabkan oleh bibit GMO juga akan dipaparkan dalam bab ini.

Bab III: Faktor-Faktor Penyebab *Economic-nationalism*

Dalam bab ini peneliti akan menjabarkan faktor internal (kepentingan nasional India) dan eksternal (peraturan WTO). Melalui bab ini peneliti akan menjawab pertanyaan pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya.

Faktor-faktor apa yang menyebabkan nasionalisme-ekonomi yang dilakukan India terhadap Monsanto.

Bab IV: Kesimpulan

Dalam bab ini peneliti menyimpulkan hasil analisis dari penelitian ini. Akan dipaparkan temuan dan kesimpulan dari seluruh deskripsi di skripsi ini.